



RENCANA KERJA

Tahun Anggaran 2018



PEMERINTAH KOTA BONTANG
RSUD TAMAN HUSADA BONTANG
TAHUN 2017



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa terpanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas selesainya penyusunan Renja RSUD Taman Husada Bontang Tahun Anggaran 2018. Hal ini dapat terlaksana atas dukungan dan kerja sama antara Manajemen RSUD Taman Husada beserta seluruh jajarannya dengan pihak Pemerintah Kota Bontang. Tentunya berkat kesungguhan dan kerja keras dalam mengidentifikasi berbagai masalah, mencari alternatif pemecahan serta merencanakan langkah-langkah yang dapat mendorong kemajuan rumah sakit.

Penyusunan Renja di era perkembangan paradigma baru di bidang pelayanan kesehatan yang disertai perubahan-perubahan baik dalam skala daerah, nasional maupun internasional mengharuskan RSUD Taman Husada Bontang secara konsisten melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Di samping itu, program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja ini juga secara langsung akan mendukung pencapaian sasaran dan program prioritas sesuai yang tertuang dalam visi dan misi pembangunan Kepala Daerah Kota Bontang.

Kami menyadari bahwa Renja Tahun 2018 ini masih banyak kekurangannya, sehingga kritik dan saran dari semua pihak akan sangat diperlukan untuk kesempurnaan dokumen Renja Tahun 2018 ini. Dan tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renja Tahun 2018 ini. Harapannya, semoga Renja Tahun 2018 mendapat dukungan dari Pemerintah Kota Bontang, Provinsi Kaltim dan Pusat sehingga dapat dilaksanakan secara maksimal pada tahun anggaran 2018.

Wassala

Bontang, 15 Maret 2017
Direktur,

drg. W.H. Agustini, M.Kes
Pembina Muda Utama
NIP: 19640817 199003 2 011

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra RSUD	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD	16
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD	17
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	21
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	21
3.2. Tujuan dan sasaran Renja RSUD Taman Husada	22
3.3. Program dan Kegiatan	23
BAB IV PENUTUP	28

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan agar setiap daerah otonom menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Jenjang perencanaan pembangunan daerah tersebut terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 20 (dua puluh) tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 5 (lima) tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan. Setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berkewajiban menyusun rencana strategis (*strategic plan*) dan rencana kerja tahunan (*performance annual plan*) mengacu pada perencanaan pembangunan daerah dimaksud.

Sistem perencanaan pembangunan nasional menghasilkan dokumen-dokumen rencana di tingkat daerah sebagai berikut:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- 3) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
- 4) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
- 5) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Seiring dengan terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota Bontang periode tahun 2017 – 2021, maka pemerintah Kota Bontang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2017-2021 yang memuat Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih sebagai penjabaran Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bontang Tahun 2005 - 2025. RPJMD Kota Bontang 2017 – 2021 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD 2017 - 2021.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk

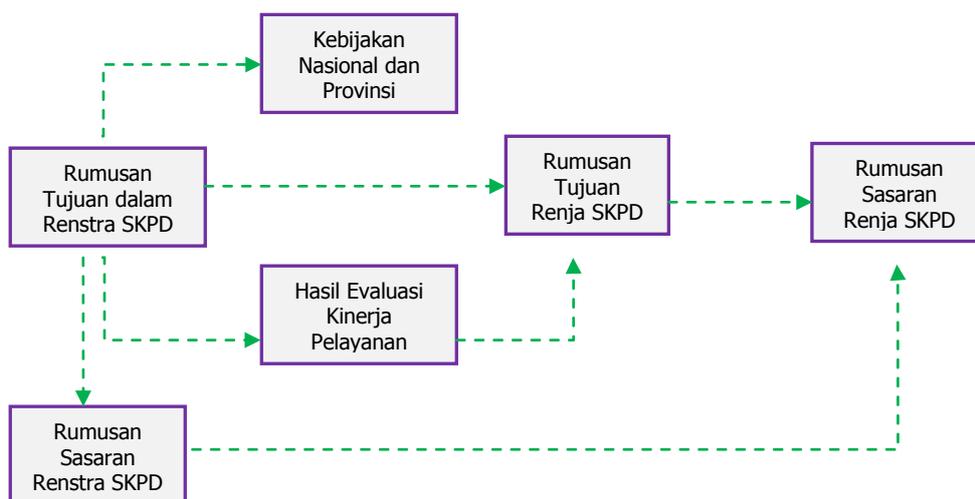
periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renstra SKPD 2017 – 2021 menjadi pedoman penyusunan Renja SKPD setiap tahun dalam periode yang sama yaitu tahun 2017-2021.

Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Dalam hal ini, kerangka regulasi adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Sedangkan kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Gambar 1.1

Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Kabupaten/Kota



Setelah melalui proses forum SKPD dan Musrenbang tingkat kota/provinsi/pusat, kemudian dilakukan verifikasi terhadap Renja SKPD dengan RKPD. Verifikasi terhadap rancangan Renja SKPD bertujuan untuk menilai apakah rancangan akhir Renja SKPD sudah sesuai dengan RKPD yang sudah disahkan dengan peraturan kepala daerah. Penetapan rancangan akhir Renja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah. Selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan. Program dan kegiatan prioritas tersebut menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS).

1.2. Landasan Hukum

Landasan konstitusional Renja RSUD Taman Husada adalah Pancasila dan UUD 1945. Landasan operasionalnya adalah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan terkait sebagai berikut:

1. Tap MPR RI No. X tahun 1998 tentang pokok-pokok reformasi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23/1992 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
13. SK Menkes RI No. 131 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 741/Menkes/Per/VII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Bontang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005 - 2025;
18. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja RSUD Taman Husada;
19. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2017 - 2021;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan Rencana Kerja RSUD Taman Husada Kota Bontang Tahun 2018 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja RSUD Taman Husada Daerah Kota Bontang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2018.

Selain itu, penyusunan Rencana Kerja tahun 2018 dimaksudkan untuk menjadi pedoman di lingkungan RSUD Taman Husada Kota Bontang dalam menyusun program dan kegiatan prioritasnya pada tahun anggaran 2018. Sedangkan tujuannya adalah :

1. Mengoperasionalkan RKPD Kota Bontang tahun 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Taman Husada dalam rangka mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kota Bontang.
2. Merumuskan program dan kegiatan prioritas pembangunan RSUD Taman Husada Kota Bontang selama tahun 2018.
3. Menjadi acuan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) di lingkungan RSUD Taman Husada tahun anggaran 2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan Renja SUUD Taman Husada Kota Bontang yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA RSUD

Berisi evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra RSUD Taman Husada tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA RSUD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra RSUD

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016

Pada tahun anggaran 2016, RSUD Taman Husada mengelola 11 program dan 24 kegiatan belanja langsung dengan jumlah anggaran Rp. 81.287.051.589,00,- (*delapan puluh satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah*) dengan Realisasi fisik kegiatan sebesar 99.79% dan realisasi keuangan sebesar 96.30%.

Secara keseluruhan realisasi fisik kegiatan hampir adalah 100%, tetapi terdapat dua kegiatan yang tidak terealisasi sebesar 100% yaitu Kegiatan Pendukung Persiapan Akreditasi Rumah Sakit yang bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus), mencapai realisasi fisik sebesar 71,29% dan realisasi keuangan sebesar 57.14% hal ini disebabkan hanya 5 dari 7 kegiatan yang dapat diselenggarakan, artinya 2 kegiatan tidak dapat dilaksanakan:

1. Kegiatan Workshop SKP (Sasaran Keselamatan Pasien) mendapat penundaan jadwal dari KEMENKES dan tidak dapat kepastian sampai dengan akhir tahun.
2. Kegiatan Survei Simulasi sudah dijadwalkan oleh KEMENKES dan KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit), namun tidak dapat direalisasikan karena melewati batas penyelenggaraan dan pertanggungjawaban keuangan yang ditentukan pada tanggal 15 Desember 2016

Yang kedua, Kegiatan yang tidak mencapai 100% yaitu kegiatan Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan. Hal ini dikarenakan KEMENKES tidak dapat memberikan penugasan khusus lanjutan Dokter Spesialis yang berakhir Juli 2016 dan Upaya pengajuan kerjasama baru tentang Pelayanan Patologi Anatomi terkendala dengan kondisi Keuangan Pemerintah Kota Bontang yang mengalami penurunan anggaran untuk Belanja Jasa Pemeriksaan Medis. Sehingga Kegiatan Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan pada

Tahun 2016 mencapai realisasi fisik sebesar 98,86% dan keuangan sebesar 45,06%.

2.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017

Pada tahun anggaran 2017, RSUD Taman Husada mengelola 4 program dan 9 kegiatan belanja langsung dengan jumlah anggaran Rp. 62.806.910.000,00,-. Sampai dengan semester pertama, realisasi fisik kegiatan rata-rata sebesar 21,81% dengan realisasi keuangan sebesar 15,16%.

Untuk mencegah timbulnya masalah maupun hambatan dalam pelaksanaan program kegiatan maka dalam melakukan perencanaan dan penganggaran perlu mempertimbangkan hal-hal yang kemungkinan menjadi faktor penyebabnya. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk menghindari faktor-faktor penyebab yang dapat menimbulkan masalah antara lain adalah:

- 1) Perlunya pertimbangan yang matang terhadap perencanaan penganggaran kegiatan atau paket pekerjaan di anggaran APBD-perubahan jika dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu pelelangan.
- 2) Kegiatan yang tidak dapat terealisasi dapat dihapus di anggaran perubahan kemudian dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya sehingga tidak membebani capaian kinerja SKPD.
- 3) Perlunya tindakan tegas terhadap pihak penyedia yang tidak mematuhi aturan pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk memberikan sanksi Black List.

**Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
dan Pencapaian Renstra RSUD Taman Husada s/d Tahun 2016
Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur**

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Taun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target program dan kegiatan tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian (%)		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realiasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)		
1												
1	02											
1	02	28										
1	02	28	06		100%	100%	100%	98,86%	98,86%	100%	100%	99,62%
1	02	24										
					0%	73%	0%	0%	0%	0%	24%	#DIV/0!

				Kegiatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif	Persentase pasien ibu hamil dan neonatal dengan kondisi emergensi yang terlayani	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0
				Kegiatan Pelayanan HIV-AIDS	Persentase pasien penderita gangguan jiwa yang HIV-AIDS yang terlayani	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0
1	02	19		Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya media promosi kesehatan RS		100%						
1	02	19	01	Kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Tersedianya leaflet kesehatan di rumah sakit	3	12 topik	100%	100%	100%	100%	100%	
1	02	23		Program standarisasi pelayanan kesehatan	Meningkatnya informasi kepuasan pasien		0%						
				Kegiatan penyusunan panduan kompetensi & jenjang karir keperawatan	tersedianya dokumen/buku panduan kompetensi & jenjang karir keperawatan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
1	02	33		Program pengembangan manajemen kesehatan	Meningkatnya akreditasi pelayanan		Akreditasi Paripurna						

1	02	33	10	Kegiatan konsultasi dan sertifikasi akreditasi rumah sakit	Terakreditasinya pelayanan rumah sakit	Akreditasi Paripurna	Akreditasi Paripurna	madya	0%	0%	Akreditasi Paripurna	Akreditasi Paripurna	
1	02	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat		73,3%						
1	02	05	01	Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal	jumlah aparatur yang mengikuti diklat fungsional	40 orang	88%	100%	100%	100%	100%	96%	
1	02	05	05	Kegiatan pendidikan dan pelatihan BTCLS	perawat bersertifikat BTCLS	40 orang	%	40 orang	0%	0%	100%	#VALUE!	
1	02	05	23	Kegiatan pendidikan dan pelatihan excellent service	pegawai bersertifikat excellent service	40 orang	0%	40 orang	0%	0%	0%	0%	
1	02	05	24	Kegiatan pendidikan dan pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja	pegawai bersertifikat K3	40 orang	30 0orang	40 orang	0%	0%	0%	#VALUE!	
				Kegiatan pendidikan dan pelatihan penunjang medik	Peserta Diklat mengikuti Diklat penunjang medik	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
				Kegiatan pelatihan pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)	Jumlah aparatur yang lulus PPI	40 orang	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
				Kegiatan pelatihan keselamatan pasien dan manajemen resiko klinis	Jumlah aparatur yang yang lulus pelatihan	40 orang	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
				Kegiatan pendidikan dan pelatihan ATCN (Advance Trauma Centre Nurse)	Jumlah peserta yang lulus ATCN	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
				Kegiatan pendidikan dan pelatihan perawatan luka	Perawat besertifikat perawatan luka	40 orang	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
				Kegiatan pendidikan dan pelatihan asuhan keperawatan	Perawat besertifikat asuhan keperawatan	-	100%	0%	100%	0%	0%	67%	

				Kegiatan pendidikan dan pelatihan assesor	Perawat dan bidan bersertifikat assesor	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
				Kegiatan bimbingan teknis kredensial	Perawat dan bidan bersertifikat kredensial	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
				Kegiatan bimbingan teknis audit keperawatan	Perawat dan bidan bersertifikat audit keperawatan	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
				Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	Pegawai bersertifikat Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	40 orang	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
				Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Code Blue	Dokter dan Perawat bersertifikat Code Blue	40 orang	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
				Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)	Dokter, Bidan & Perawat bersertifikat Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
				Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD)	Pegawai bersertifikat Bantuan Hidup Dasar (BHD)	40 orang	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
1	02	26		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit		96%						
1	02	26	01	Kegiatan pembangunan rumah sakit (perluasan)	Tercapainya pembangunan Gedung B RSUD Taman Husada	0%	94%	0%	0%	0%	0%	31%	
1	02	26	18	Kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	tersedianya alat-alat kesehatan sesuai kebutuhan	5%	85%	100%	0%	0%	100%	62%	
1	02	26	28	Pengembangan sistem informasi rumah sakit umum daerah	tersedianya SIMRS (Penggantian SIMRS)	10%	33%	100%	0%	0%	100%	44%	

1	02	26	29	Kegiatan pengadaan linen rumah sakit	tersedianya linen rumah sakit	5%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	02	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur rumah sakit		97%						
1	02	02	05	Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional	tersedianya kendaraan dinas/operasional	1	0%	100%	0%	0%	0%	0%	
1	02	02	07	Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	-	92%	100%	0%	0%	100%	64%	
1	02	02	21	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	-	100%	90%	100%	111,11%	100%	100%	
1	02	02	23	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	02	02	25	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	100%	95%	97%	100%	103,09%	100%	98%	
2	02	02	26	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu, Dan Lain-Lain)	Tersedianya perlengkapan RT (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu, Dan Lain-Lain)	5%	95%	97%	100%	103,09%	100%	98%	
1	02	02	27	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan gedung kantor	5%	98%	100%	100%	100%	100%	99%	
1	02	27		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	Terpeliharanya efektivitas sarana dan prasarana rumah sakit		100%						

1	02	27	16	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	terpeliharanya instalasi pengolahan limbah rumah sakit (STP,WTP,Incinerator)	100%	93%	100%	100%	100%	100%	98%	
1	02	27	17	Kegiatan pemeliharaan/rutin berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	terpeliharanya alat-alat kesehatan rumah sakit	10%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	02	01		Program pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		98,2%						
1	02	01	02	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya air, listrik dan berfungsinya alat komunikasi kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	02	01	06	Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya efektivitas perizinan kendaraan dinas/operasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	02	01	13	Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	7%	90%	100%	92%	92%	0%	61%	
1	02	01	17	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman rapat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	02	01	18	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang diikuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	02	01	19	Kegiatan penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	tersedianya tenaga administrasi/teknis perkantoran	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	02	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya kedisiplinan berpakaian aparatur		100%						
1	02	03	03	Kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan	tersedianya pakaian kerja lapangan bagi aparatur	10%	100%	0%	0%	0%	0%	33%	

1	02	03	05	Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu bagi aparaturnya	-	100%	0%	0%	0%	0%	33%	
1	02	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Lancarnya pelaporan kinerja dan keuangan		94%						
1	02	06	01	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	tersedianya laporan capaian kinerja SKPD	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	02	06	02	Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran	tersedianya laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	02	06	04	Kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	02	06	06	Kegiatan monitoring dan evaluasi	tersedianya laporan monev	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	03	06	13	Penyusunan Renstra SKPD (Renstra Bisnis)	tersedianya dokumen renstra bisnis	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	02	06	14	Kegiatan penyusunan profil rumah sakit	tersedianya buku profil rumah sakit	1	100%	100%	100%	100%	0%	67%	
1	02	02	11	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	tercapainya pemanfaatan teknologi Informasi secara optimal		0%						
					terpeliharanya peralatan dan perlengkapan jaringan teknologi Informasi	15%	0%	100%	0%	0%	100%	33%	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan
RSUD Taman Husada Kota Bontang

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Bed Occupancy Rate (BOR)	60-85%	60-85%	60-85%	60-85%	47%	56%			
			Average Length of Stay (Av LOS)	6-9 hari	6-9 hari	6-9 hari	6-9 hari	5 hari	4 hari			
			Bed Turn Over (BTO)	40-50 kali	40-50 kali	40-50 kali	40-50 kali	45 kali	53 kali			
			Turn Over Interval (TOI)	1-3 hari	1-3 hari	1-3 hari	1-3 hari	4 hari	3 hari			
			Gros Death Rate (GDR)	≤45/10 00	≤45/10 00	≤45/10 00	≤45/10 00	27,14 ‰	32 ‰			
			Net Death Rate (NDR)	<25/10 00	<25/10 00	<25/10 00	<25/10 00	16,97 ‰	19 ‰			
			Kunjungan Instalasi Rawat Jalan	42.970	42.970	42.970	42.970	51.398	54.776			
			Kunjungan IRD	33.425	33.425	33.425	33.425	14.530	16.940			

Pada tabel 2.1 tergambar bahwa secara umum realisasi tingkat capaian program dan kegiatan hingga tahun 2016 sebagian besar mencapai angka di atas 90%. Hanya saja memang ada beberapa kegiatan mempunyai capaian yang masih belum maksimal karena keterbatasan alokasi anggaran/raasionalisasi anggaran di Pemerintah Kota Bontang termasuk RSUD Taman Husada Bontang.

Pada tabel 2.2 terlihat bahwa secara umum realisasi dari enam indikator utama kinerja rawat inap rumah sakit di atas masih dalam interval target ideal nasional. Realisasi Av LOS 2016 adalah 4 hari, menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pelayanan kesehatan di rumah sakit tergolong baik. Begitu pula realisasi BTO (53 kali) pada tahun 2015 menunjukkan tingkat efisiensi pemakaian tempat tidur termasuk baik karena masih termasuk dalam interval angka ideal. RSUD Taman Husada terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya hingga meraih sertifikasi ISO 9001-2008 dan akreditasi 12 pelayanan dari KARS pada tahun 2011. Selain itu, RSUD Taman Husada telah menerima penghargaan piala citra kategori pelayanan publik terbaik dari Presiden RI tahun 2008.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Kota Bontang memiliki tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota di bidang teknis pelayanan kesehatan dengan metode/cara penyembuhan maupun pemulihan, yang dilaksanakan secara serasi, terpadu melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dan pelaksanaan upaya rujukan serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan sesuai dengan fungsinya sebagai Rumah Sakit Tipe B.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan ada beberapa isu-isu penting yang dihadapi yaitu :

- a. RSUD Taman Husada Kota Bontang memiliki fasilitas antara lain ruang Perawatan dengan kapasitas Tempat Tidur sebanyak 164 TT dengan alokasi pada ruang perawatan kelas III yaitu sebanyak 57 tempat tidur (54,37%).
- b. Dengan diberlakukannya pelaksanaan BPJS menyebabkan jumlah kunjungan rawat Inap kelas III cukup tinggi, sehingga sarana dan prasarana kelas III perlu terus menerus ditingkatkan.
- c. Kecenderungan meningkatnya pasien pada ruang Intensif yang tidak terlayani, hal ini disebabkan diantaranya karena masih kurangnya sarana/alat kesehatan dan SDM kesehatan sebagai pendukung pelayanan, serta meningkatnya BOR pada ruang ICU perlu disikapi dengan upaya antisipatif dan perencanaan pelayanan kesehatan yang komprehensif, sebagai mata rantai dari upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya dan memajukan kesejahteraan bangsa.
- d. Sebagai institusi milik pemerintah daerah, RSUD Taman Husada dituntut untuk mampu menjawab setiap permasalahan kesehatan yang sesuai dengan bidangnya. Kualitas pelayanan yang prima dan biaya pelayanan yang terjangkau oleh seluruh masyarakat Kota Bontang menjadi sorotan utama keberhasilan RSUD Taman Husada. Selain itu, RSUD Taman Husada diharapkan menjadi salah satu rumah sakit rujukan yang andal di wilayah Kota Bontang dan sekitarnya. Di sisi lain persaingan pelayanan dengan beberapa rumah sakit swasta yang ada semakin ketat. Terdapat tiga rumah sakit swasta dan dua klinik rawat inap sebagai pesaing utama RSUD Taman Husada. Faktor lain yang sangat berpengaruh adalah tingginya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya usia harapan hidup warga Kota Bontang, tentunya akan meningkatkan kebutuhan pelayanan kesehatan.
- e. Salah satu pengaruh kuat dari lingkungan luar rumah sakit adalah adanya produk hukum yang mendukung atau justru menghambat pengembangan di rumah sakit. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan (PP No. 23/2005) yang memberi kesempatan pada institusi pemerintah penyedia

jasa dan barang untuk menerapkan praktek manajemen keuangan yang fleksibel dengan menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Dengan fleksibilitas yang dimiliki, sebuah BLU diharapkan akan mampu menghasilkan pelayanan yang bermutu, tepat sasaran, lebih akuntabel dan pada akhirnya memiliki daya saing dalam bidang dimana lembaga tersebut bergerak. Bagi rumah sakit daerah, peluang ini merupakan kesempatan emas untuk memulai langkah perbaikan sistem manajemen, sehingga dikenal juga sebagai reformasi bidang kesehatan. Keputusan bagi sebuah rumah sakit daerah untuk mendapatkan status BLU berada pada Pemerintah Daerah, melalui penerbitan Surat Keputusan.

- f. Dari sisi internal, RSUD Taman Husada Bontang perlu mempersiapkan sistem manajemennya agar siap menjadi lembaga yang transparan, akuntabel dan menghasilkan pelayanan bermutu. Hal tersebut seiring dengan kapasitas bangunan dan peralatan yang telah tersedia agar dapat beroperasi seoptimal mungkin.
- g. Tenaga kesehatan belum semua sesuai dengan kompetensi yang diperlukan, jumlah dan jenis tenaga dokter spesialis belum mencukupi sesuai standar type rumah sakit.
- i. Dana dan peralatan medis belum mencukupi standar kebutuhan baik jenis maupun jumlahnya.
- j. Jumlah ruangan di instalasi rawat jalan yang tersedia saat ini belum mencukupi, khususnya untuk tempat poliklinik dokter spesialis yang terus meningkat jumlahnya. Peningkatan kelas rumah sakit dari Kelas C menjadi Kelas B Non Pendidikan menyebabkan kapasitas pelayanan dan jumlah SDM yang semakin meningkat mengharuskan pembangunan gedung baru.
- k. Pelayanan darah belum optimal seperti penyediaan fasilitas, jejaring pelayanan darah, ketersediaan dalam jumlah yang cukup dan tepat waktu.
- l. Akreditasi rumah sakit baru sampai pada tingkat dasar 12 (dua belas) pelayanan sedangkan visi rumah sakit menghendaki tercapainya akreditasi internasional,

- m. Meningkatnya tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan kesehatan yang bertaraf internasional,
- n. Ketersediaan obat esensial, penggunaan obat yang tidak rasional dan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkualitas belum optimal,
- o. Sistem informasi manajemen rumah sakit belum berfungsi secara maksimal sehingga pelaporan data dan informasi masih berjalan lambat. IT-SIMRS yang dikembangkan sejak 2008 perlahan-lahan mulai tertinggal dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini. Dengan demikian, diperlukan pengembangan IT SIMRS untuk dapat mendukung perkembangan pelayanan rumah sakit.
- p. Pengelolaan lingkungan hidup rumah sakit masih belum optimal jika ditinjau berdasarkan aturan yang ditetapkan pemerintah. Sarana dan prasarana lainnya masih perlu ditingkatkan,
- q. Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit memerlukan biaya yang sangat tinggi.
- r. Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD perlu dioptimalkan sehingga tujuan yang hendak dicapai yakni untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit dapat terwujud. Salah satu solusinya adalah peningkatan SDM pengelola keuangan BLUD dan penerapan sistem prosedur teknis BLUD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan RPJMN Kementerian Kesehatan RI periode 2015-2019 maka ditargetkan Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional. Menurut Kepmenkes No.129/2008 tentang Standar Pelayanan Medis Rumah Sakit bahwa setiap Rumah Sakit harus dapat memenuhi target kinerja untuk 21 jenis pelayanan. Adanya UU perlindungan konsumen dan UU Pelayanan publik maka sarana pelayanan publik harus mampu memberikan pelayanan prima. Dengan demikian diharapkan agar setiap pelayanan kesehatan harus diberikan sesuai dengan standard, oleh karena itu setiap Rumah Sakit pemerintah harus dapat terakreditasi dan didorong ke arah Badan Layanan Umum (BLU).

Rumah Sakit terakreditasi adalah rumah sakit yang telah mendapat pengakuan oleh Lembaga Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Untuk tingkat dasar (5 pelayanan), tingkat lanjut (12 pelayanan) dan tingkat lengkap (15 pelayanan).

Selain terakreditasi maka setiap rumah sakit diharapkan dapat tersertifikasi ISO 9001-2008, sebagai bentuk pengakuan siap memberikan pelayanan prima selama 24 jam dan ISO 14000 mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Tentunya untuk memenuhi tuntutan dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit yang semakin meningkat. Salah satu faktor pendorongnya adalah adanya jaminan pembiayaan kesehatan di rumah sakit bagi masyarakat miskin dari pemerintah. Keterbatasan ruangan dan tempat tidur kelas 3 khususnya untuk masyarakat miskin merupakan salah satu faktor penghambat. Efisiensi sistem rujukan juga sangat berpengaruh terhadap akses masyarakat miskin ke rumah sakit.

Kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit sangat dipengaruhi oleh jumlah dan jenis tenaga kesehatan. Masalah kurangnya tenaga dokter spesialis

baik jumlah maupun jenisnya menimbulkan dampak terhadap rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas.

Masalah pembiayaan dan biaya operasional rumah sakit di era BLUD sangat tinggi dibandingkan dengan pendapatan jasa layanan, akibatnya anggaran dari pemerintah tetap sangat dibutuhkan. Alokasi anggaran kesehatan sesuai dengan **Perda SKP No. 20 Tahun 2008** tentang sistem kesehatan provinsi Kalimantan Timur yaitu minimal 10% dari dana APBD merupakan salah satu faktor pendorong. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah propinsi Kalimantan Timur bertekad memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan pada seluruh masyarakat di puskesmas dan rumah sakit untuk rawat jalan maupun rawat inap kelas tiga dengan skema pembiayaan sharing dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja RSUD Taman Husada

Dengan mempertimbangkan trend isu – isu tersebut yang disampaikan pada bab sebelumnya, maka untuk mengantisipasinya seiring dengan program pemerintah dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat guna mencapai Tujuan dan Sasaran baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, khususnya pelayanan bagi masyarakat keluarga miskin sasaran yang ingin dicapai antara lain tepenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat pengguna layanan kesehatan.

Kemudian, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai pada penyusunan rencana kerja (Renja) RSUD Taman Husada tahun 2018 tetap konsisten mengacu pada Rencana Strategi (Renstra) yang telah ditetapkan. Pada prinsipnya tujuan dan sasaran tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi kepala daerah dan RPJP Kota Bontang.

Tujuan utama dan sasaran yang ingin dicapai RSUD Taman Husada selama tahun 2018 adalah:

- a. Tujuan Utama :
 - 1. Mendukung Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Bontang Secara Optimal,
 - 2. Meningkatkan mutu manajemen Pelayanan rumah sakit,
 - 3. Meningkatkan kompetensi SDM rumah sakit,
 - 4. Meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit.
- b. Sasaran-sasaran :
 - 1. Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu,
 - 2. Meningkatnya mutu manajemen pelayanan rumah sakit,
 - 3. Meningkatnya kompetensi SDM rumah sakit,
 - 4. Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit.

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan RSUD Taman Husada tahun 2018 adalah :

- ✓ Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan RPJP Kota Bontang. RSUD Taman Husada sebagai salah satu SKPD di Kota Bontang mempunyai tugas dan fungsi untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, yang salah satu tujuannya adalah mewujudkan masyarakat Kota Bontang yang sehat melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan yang sesuai standar pelayanan.
- ✓ Mendukung pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDGs) khususnya yang berkaitan dengan kesehatan seperti Menurunkan angka kematian anak, Meningkatkan kesehatan ibu, dan Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya.
- ✓ Pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) rumah sakit.

Secara garis besar, jumlah program dan kegiatan RSUD Taman Husada yang terakomodir dalam RKPD Kota Bontang tahun anggaran 2016 adalah sebanyak 14 (empat belas) program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan semuanya terfokus di

RSUD Taman Husada. Pagu indikatif dari keseluruhan program dan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 108.286.738.000,-. (terbilang: *seratus delapan milyar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*). Rumusan program dan kegiatan RSUD Kota Bontang tahun 2018 sesuai dengan Rancangan RKPD Kota Bontang sebagaimana tertuang pada tabel di bawah ini.

PEMERINTAH KOTA BONTANG
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SKPD KAB/KOTA TAHUN 2018

KODE SKPD : 1.02.02
 NAMA SKPD : RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
	KODE	Catt		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp. 0000)		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp. 0000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Urusan Wajib				APBD	53.593.779.900,00		58.953.157.890,00
	1,2	Kesehatan				APBD	53.593.779.900,00		58.953.157.890,00
	1.2.1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				APBD	4.591.910.000,00		5.051.101.000,00
	1.2.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	telpon, internet, air, listrik	Kota Bontang	1 Tahun	APBD	3.427.600.000,00	--	3.770.360.000,00
	1.2.1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya perizinan kendaraan dinas/ operasional uptodate	SKPD Kota Bontang	1 Tahun	APBD	44.310.000,00	--	48.741.000,00

1.2.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman kantor	SKPD Kota Bontang	1 Tahun	APBD	75.000.000,00		--	82.500.000,00
1.2.1.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	SKPD Kota Bontang	12 bulan	APBD	300.000.000,00		--	330.000.000,00
1.2.1.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	SKPD Kota Bontang	1 Tahun	APBD	745.000.000,00		--	819.500.000,00
1.2.2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				APBD	1.501.869.900,00			1.652.056.890,00
1.2.2.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional terpelihara	SKPD Kota Bontang	1 Tahun	APBD	800.000.000,00		--	880.000.000,00
1.2.2.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	SKPD Kota Bontang	1 Tahun	APBD	701.869.900,00		--	772.056.890,00
1.2.27	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT				APBD	900.000.000,00			990.000.000,00

		JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA								
	1.2.27.16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	Instalasi Peengelolaan Limbah	SKPD Kota Bontang	1 Paket	APBD	900.000.000,00		--	900.000.000,00
	1.2.35	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT BLUD				APBD	47.500.000.000,00			52.250.000.000,00
	1.2.35.1	Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Rumah Sakit BLUD	Terselenggaranya pelayanan kesehatan rumah sakit	SKPD	1 Tahun	APBD	47.500.000.000		--	52.250.000.000
TOTAL						APBD	54.493.779.900,00			59.943.157.890,00

BAB V. PENUTUP

Beberapa hal yang dianggap penting dalam penyusunan rencana kerja RSUD Taman Husada tahun 2018 antara lain :

- ✓ Masalah pembiayaan dan biaya operasional rumah sakit di era BLUD sangat tinggi dibandingkan dengan pendapatan jasa layanan, akibatnya anggaran dari pemerintah tetap sangat dibutuhkan. Alokasi anggaran kesehatan yang belum sesuai dengan **Perda SKP No. 20 Tahun 2008** tentang sistem kesehatan provinsi Kalimantan Timur yaitu minimal 10% dari dana APBD. Demikian juga Perda Kota Bontang telah menetapkan alokasi anggaran kesehatan Kota Bontang sebesar minimal 10% dari dana APBD belum maksimal.
- ✓ Jika merujuk pada type RSUD Taman Husada yakni kelas B non pendidikan maka masih terjadi kekurangan dokter spesialis baik jumlah maupun jenis spesialisasi. Meskipun telah ada beberapa dokter umum yang melanjutkan pendidikan ke jenjang dokter spesialis serta program kemitraan dengan Universitas Airlangga.
- ✓ Di sisi lain, pemenuhan jumlah dan jenis dokter spesialis berdampak pada meningkatnya kebutuhan ruang poliklinik, ruang perawatan, dan peralatan kesehatan. Artinya pembangunan gedung rumah sakit dan pengadaan peralatan kesehatan mutlak diperlukan sehingga membutuhkan anggaran yang lebih besar. Kebutuhan anggaran mengenai hal tersebut telah diusulkan ke APBD Kota Bontang, Provinsi Kaltim, dan APBN. Jika realisasi dukungan anggaran terhadap hal tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan maka tentu akan berpengaruh pada kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit.
- ✓ Pelaksanaan rencana kerja tahun anggaran 2018 akan menyesuaikan kaidah-kaidah maupun perubahan-perubahan kegiatan dan anggarannya sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat dan daerah.

Pada prinsipnya RSUD Taman Husada akan menindaklanjuti rencana kerja yang disetujui oleh baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian usulan rencana kerja (Renja) ini disusun dan disampaikan kepada pihak'terkait.